



ISLAMIC ECONOMICS QUOTIENT

JOURNAL OF ECONOMICS & BUSINESS SHARIA

JUDUL PENELITIAN

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut untuk Memenuhi
Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua
Berkajian Maqasid

PENELITI

1. M. Zainal Abidin
Dosen LB di Stain Al-Fatah Jayapura

2. Ahmad Djalaluddin
Dosen Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Siswanto
Dosen Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Link Journal:

[http://ejournal.uin-malang.ac.id/
index.php/ieq/index](http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ieq/index)

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua dalam Kajian Maqasid Syariah

(Studi Kasus Masyarakat Nelayan Port Numbay Enggros Kota Jayapura)

Muhammad Zainal Abidin

Dosen LB STAIN Al-Fatah Jayapura

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. Siswanto, M.SI

Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

<p>ABSTRAKSI</p> <hr/> <p>NASKAH MASUK: 22/10/2017 NASKAH REVISI: 03/12/2017 NASKAH TERIMA: 03/01/2018</p>	<p>Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sumber daya alam laut masyarakat asli papua dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka dan untuk mengetahui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) laut yang dilakukan masyarakat asli Papua dalam kajian Maqasid Syariah.</p> <p>Desain/metodologi/pendekatan Metode penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau melau lisan dari orang-orang yang diamati dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan, menggambarkan berbagai kondisi fenomena yang terjadi dalam masyarakat asli Papua di Kota Jayapura dalam pengelolaan sumber daya alam berupa sumber daya laut dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka.</p> <p>Hasil temuan Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pengelolaan tradisional dalam hal itu dapat dilihat dari kurangnya ikut campur pemerintah, kurangnya pengetahuan dan teknologi, sehingga alat-alat yang digunakan dalam pengelolaanpun hanya sebatas alat-alat tradisional. Tetapi dengan pengelolaan tradisional ini mereka mendapatkan nilai positif dari kehidupan sosial mereka. Jadi wajar jika untuk perkembangan perekonomian sangat sulit atas alasan tersebut di atas. Pengelolaan sumber daya alam sangat cocok atau baik jika dilakukan dengan budaya atau tradisi yang menanamkan</p>
---	---

prinsip tanpa paksaan yang mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat, tetapi pengelolaan yang tradisional ini menimbulkan dampak negatif yaitu sulitnya perkembangan perekonomian di masyarakat.

Keterbatasan penelitian

(1) Resiko subyektifitas yang pengendalian ada pada peneliti,
(2) Metode kualitatif yang dikuatkan dengan data kualitatif.

Implikasi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi menemukan cara strategi mengelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat asli Papua.

Implikasi sosial

Penelitian ini memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat yang lebih mendalam dimana pengelolaan SDA secara adil dapat terwujud karena adanya *maqasid syariah*.

Orisinalitas/nilai

Dengan latar yang tidak klise dan kajian yang spesifik yaitu syariah dimana mayoritas masyarakatnya beragama non-islam menjadi *novelty*-nya.

Kata kunci:

Pengelolaan SDA, Ekonomi Masyarakat Papua, Maqasid Syariah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan telah diakui dunia secara Internasional (UNCLOS 1982) yang selanjutnya *diratifikasi* oleh Indonesia dengan undang-undang No. 17 tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif.¹ Provinsi Papua memiliki luas wilayah yang paling luas dengan berbagai keanekaragaman sumber daya alam dengan luas wilayah 319.036,05.²

Papua merupakan wilayah yang terdapat banyak sekali sumber daya alam salah satunya yaitu sumber daya alam laut dan kekayaan alam lainnya. Provinsi ini memiliki potensi 2,5 milyar ton batuan biji emas dan tembaga, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport. Disamping itu, masih terhadap beberapa potensi tambang lain seperti batu bara berjumlah 6,3 juta ton, batu gamping di atas areal seluas 190.000 ha, pasir kuarsa seluas 75 ha dengan potensi hasil 21,5 juta ton, lempung sebanyak 1,2 juta ton, marmer sebanyak 350 juta ton, granit sebanyak 125 juta ton dan hasil tambang lainnya

¹ Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax vol. 1-2, ISSN : 23-02-3589, 2013, hal. 1

² Buku Informasi Statistik, Kementrian Pekerjaan Umum, 2013, hal. 16

seperti pasir, besi, nikel dan krom.³ Belum lagi dari sektor flora dan fauna yang ada di wilayah Papua. Menurut kementerian kehutanan Republik Indonesia wilayah hutan Provinsi Papua memiliki luas kurang lebih 42.224.840 hektar.⁴

Tetapi pada kenyataannya Provinsi Papua yang tergolong wilayah kaya akan sumber daya alam tetapi masih terdapat banyak sekali masyarakatnya yang tergolong tidak mampu terkhusus di wilayah pesisir, data tentang kemiskinan diambil dari BPS Provinsi Papua tahun 2014 dikatakan bahwa Papua merupakan Provinsi yang memiliki presentasi 27,80 % tingkat kemiskinannya, kemudian diikuti oleh Papua Barat 26,26 %, NTT 19,60 %, Maluku 18,4 %, Gorontalo, 17,41 % hal itu membuktikan bahwa meskipun Papua memiliki potensi SDA yang banyak tetapi tidak menjamin masyarakatnya lebih sejahtera. Hal tersebut yang menjadi persoalan dalam penelitian ini sehingga dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul *Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Untuk Memenuhi Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua Dalam Kajian Maqasid Syariah*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori kepemilikan

Menurut Coase dalam pandangannya mengatakan bahwa jika hak kepemilikan kepemilikan telah diatur dengan baik, maka sejatinya intervensi pemerintah (dalam wujud apapun) tidak dibutuhkan lagi, sebab jika setiap hak kepemilikan telah jelas siapa yang mempunyainya, maka hasil kegiatan ekonomi akan efisien dengan sendirinya. Seterusnya, aspek distribusi dari hasil kegiatan ekonomi tersebut akan ditentukan oleh alokasi awal dari hak kepemilikan tersebut.⁵

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut

Dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dikatakan bahwa pengelolaan Kelautan adalah pembangunan yang memberikan arahan dalam pendayagunaan daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan keterpeliharaan

³ Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Pertambangan dan Energi, 2013

⁴ Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.782/Menhut-II/2012, *Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I*.

⁵ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan (paradigm, teori dan kebijakan)*, Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 126

daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut itu sendiri diantaranya yaitu tentang penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut yang meliputi : Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian ruang laut.⁶

Kebutuhan Ekonomis

Al-ghazali membagi tiga tingkatan konsumsi yaitu, *sad ar-ramq* dan ini disebut kata *had ad-dhorurah* (batasan darurat), *had al-hajah* (batasan tingkat hajat), dan yang paling tinggi adalah *had at-tama'um* (batasan kemewahan).⁷

Maqasid Syariah

Tujuan dari maqasid syari'at adalah kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, seperti yang di ungkapkan Imam As-syatibi yaitu syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan juga di akhirat.⁸

Menurut Alie Yafie Fiqh merupakan ilmu yang mengatur hidup manusia dimuka bumi, secara garis besar pembahasan dalam ilmu fiqh yang terkait dalam penataan kehidupan manusia yaitu : 1) *Rub'u Al-Ibadat*, yaitu bagian yang menata antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sang Khaliknya, 2) *Rub'u Al Mu'ammalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya, 3) *Rub'u Al Munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, 4) *Rub'u Jinayat*, yaitu bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Empat garis besar ini dalam kebutuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia lahir batin di dunia dan akhirat.⁹

Fiqh Bi'ah (fiqh lingkungan) membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempengaruhi latar berfikir manusia. Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan yaitu :¹⁰

- a. Lingkungan Fisik, yaitu segala sesuatu disekitar kita berupa benda mati
- b. Lingkungan Biologis, yaitu segala sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup
- c. Lingkungan Sosial, adalah manusia yang berada disekitarnya.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Bab I, Ayat 9, hal. 2, tahun 2014

⁷ Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*, hal. 70

⁸ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 45

⁹ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta, Tama Printing, 2006, hal 40

¹⁰ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan "Masalah dan Penanggungannya"* Jakarta, Rineka Cipta, 2002 hal 19.

METODE PENELITIAN

Pendekataan dan jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau melalui lisan dari orang-orang yang diamati dalam penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengungkapkan, menggambarkan berbagai kondisi fenomena yang terjadi dalam masyarakat asli Papua di Kota Jayapura dalam pengelolaan sumber daya alam berupa sumber daya laut dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Dengan ini peneliti mampu memberikan makna tentang pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan.

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan, jadi dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara seksama sehingga mendapatkan data semaksimal mungkin. Kehadiran peneliti yang pertama kali yaitu untuk melakukan observasi secara langsung kepada masyarakat asli Papua yang mencari ikan dilaut, untuk melihat sejauh mana pengelolaan sumber daya alam laut. Masyarakat disini menjadi eksekutor langsung yang mengambil manfaat atas sumber daya alam laut tersebut.

Latar penelitian

Kota Jayapura secara Geografis berada pada posisi 10 28' 17,26" – 30 58' 0,28" lintang Selatan dan 137 34' 10,6" – 141 0' 8,22" Bujur Timur. Disamping itu Kota Jayapura juga merupakan Ibukota Provinsi Papua. Topografi daerah cukup bervariasi, mulai dari dataran hingga landau dan berbukit/gunung 700 meter di atas permukaan air laut. Kota Jayapura dengan luas wilayah 94.000 Ha terdapat ±30% tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa dan hutan di lindung dengan kemiringan 40% bersifat konservasi dan hutan lindung.

Data dan Sumber Data Penelitian

¹¹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002), hal. 6

Data yaitu dapat berupa suatu fakta, informasi, atau keterangan.¹² Analisis data dapat berjalan dengan cara : (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah, mengklarifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, (3) berfikir agar data tersebut mempunyai makna.

Adapun data yang akan diambil dalam penelitian yaitu bersumber dari: (1) Informan (pejabat Pemerintah yaitu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, warga masyarakat asli Papua khususnya Nelayan kampung Enggros, kepala suku/adat/tokoh masyarakat Kampung Enggros). (2) Dokumentasi yakni berupa bahan tertulis diantaranya arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian sumber daya alam laut. (3) Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan di tempat atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan sumber daya alam berupa sumber daya laut.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Asli Papua

Masyarakat Asli Papua Khususnya masyarakat Port Numbay Kampung Enggros sebelum melakukan pengelolaan sumber daya alam maka yang paling penting adalah mengenai tentang kepemilikan sumber daya alam laut tersebut dan mereka menganggap bahwa laut yang ada adalah titipan Tuhan yang diberikan dan semua berhak atas laut tersebut tetapi dalam kearifan lokal setempat maka orang yang ingin melakukan pencarian di harapkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada kepala suku setempat agar tidak salah paham dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan saat pencarian ikan tersebut.

Masyarakat menganggap bahwa alam adalah ibarat ibu yang mampu memberikan kasih sayang, memberi makan sampai kapanpun sehingga dalam kepercayaan mereka menjaga alam sama halnya merawat seorang ibu yang telah melahirkan.

Adapun larangan-larangan atau pantangan oleh masyarakat dalam kepercayaan mereka untuk menjaga alam adalah sebagai berikut :

- a. Tidak diperbolehkan mencari ikan dengan menggunakan pukot/bom.

¹² Prastoworo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012 , hal. 12

- b. Mengembalikan ikan yang tertangkap apabila masih kecil
- c. Dalam suku tertentu dilarang membuat keramba
- d. Kaum lelaki dilarang untuk mencari bia (kerang) di hutan bakau/mangrove
- e. Jika menggunakan alat tradisional semua harus menggunakan alat tradisional, jika ada yang menggunakan alat tangkap modern maka jangan bergabung di wilayah tangkapan nelayan tradisional.
- f. Tidak diperbolehkan mencari ikan satu minggu sebelum dimulai pesta adat.
- g. Pantangan untuk merusak mangrove sebagai tempat habitat bia (kerang)

Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pengelolaan tradisional dalam hal itu dapat dilihat dari kurangnya ikut campur pemerintah, kurangnya pengetahuan dan teknologi, sehingga alat-alat yang digunakan dalam pengelolaanpun hanya sebatas alat-alat tradisional. Tetapi dengan pengelolaan tradisional ini mereka mendapatkan nilai positif dari kehidupan sosial mereka. Jadi wajar jika untuk perkembangan perekonomian sangat sulit atas alasan tersebut di atas.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Masyarakat Asli Papua Dalam Kajian Maqasid Syariah

Islam datang sebagai rahmat untuk seluruh alam ajaran Islam dalam hal muammalah tidak hanya digunakan oleh orang Islam saja melainkan dapat digunakan oleh non muslim sekalipun, dalam hal ini penerapan maqasid dalam pengelolaan sumber daya alam laut yang dilakukan oleh masyarakat asli Papua adalah sebagai berikut :

- a. Penjagaan terhadap agama, dalam hal ini masyarakat yang mayoritas non muslim dalam penjagaan agama mereka menerima siapapun dengan latar belakang apapun dan dengan agama apapun untuk datang ke tempat mereka, sehingga tercipta kedamaian dalam segi sosial, ekonomi maupun politik.
- b. Perlindungan terhadap jiwa, masyarakat menerapkan dalam perlindungan jiwa ini berupa aktifitas untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup.
- c. Perlindungan terhadap akal, masyarakat juga menerapkan perlindungan akal dengan upaya memaksimalkan segala sesuatu berdasarkan akal. Hal tersebut tercermin dari sikap persiapan dalam memulai pencarian ikan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menjaga tradisi kearifan lokal.
- d. Perlindungan terhadap keturunan, masyarakat setempat juga melakukan pernikahan untuk mendapatkan keturunan sebagai pewaris yang mampu melanjutkan generasi mereka. Masyarakatpun tidak segan-segan untuk mendidik, menyekolahkan kejenjang

yang lebih tinggi bahkan sampai bangku perkuliahan mereka beranggapan bahwa agar anak-anak mereka atau keturunan mereka tidak menjadi seperti mereka dan mereka berhadapan agar keturunannya melebihi orang tuanya sendiri.

- e. Perlindungan harta, dalam hal ini terdapat dua unsur dalam perlindungan harta yaitu :
 - memilik hak untuk dijaga dari para mushnya, baik dari tindakan pencurian dan lain-lain serta harta tersebut dipergunakan dalam hal-hal yang tidak bersifat mubazir. Hal inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam menjaga hartanya mereka kurang memperhatikan harta tersebut digunakan untuk apa saja sehingga pengeluaran tidak dapat dikontrol dengan baik sehingga mengakibatkan besar pasak dari pada tiang atau besar pengeluaran dari pada pemasukan sehingga masyarakat terkendala dalam kesejahteraan perekonomian meskipun alam menyediakan lebih dari cukup kepada masyarakat.
- f. Penjagaan terhadap lingkungan, hal ini sangat diperlukan karena dengan menjaga alam dan melestarikannya secara tidak langsung maka akan berdampak pada manusia itu sendiri. Hal tersebut telah dilakukan oleh masyarakat asli Papua.
- g. Dengan demikian maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya alam sangat cocok atau baik jika dilakukan dengan budaya atau tradisi yang menanamkan prinsip tanpa paksaan yang mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat, tetapi pengelolaan yang tradisional ini menimbulkan dampak negatif yaitu sulitnya perkembangan perekonomian di masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Masyarakat nelayan asli papua dalam pengelolaannya menggunakan pengelolaan secara tradisional hal itu sebagaimana ditandai dengan kurangnya sarana dan prasana yang digunakan dalam penangkapan ikan serta minimnya pengetahuan tentang teknologi terbaru dalam penangkapan ikan tetapi dalam hal sosial para masyarakat nelayan begitu erat rasa persaudaraan diantara mereka hal tersebut ditandai dengan adanya jalinan persaudaraan diantara masyarkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan (paradigm, teori dan kebijakan)*, Erlangga, Jakarta, 2013
- Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta, Tama Printing, 2006
- Buku Informasi Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2013
- Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014
- Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan "Masalah dan Penanggungannya"* Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.782/Menhut II/2012, *Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I.*
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002)
- Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Pertambangan dan Energi, 2013
- Prastoworo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax vol. 1-2, ISSN : 23-02-3589, 2013
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Bab I, Ayat 9, hal. 2, tahun 2014